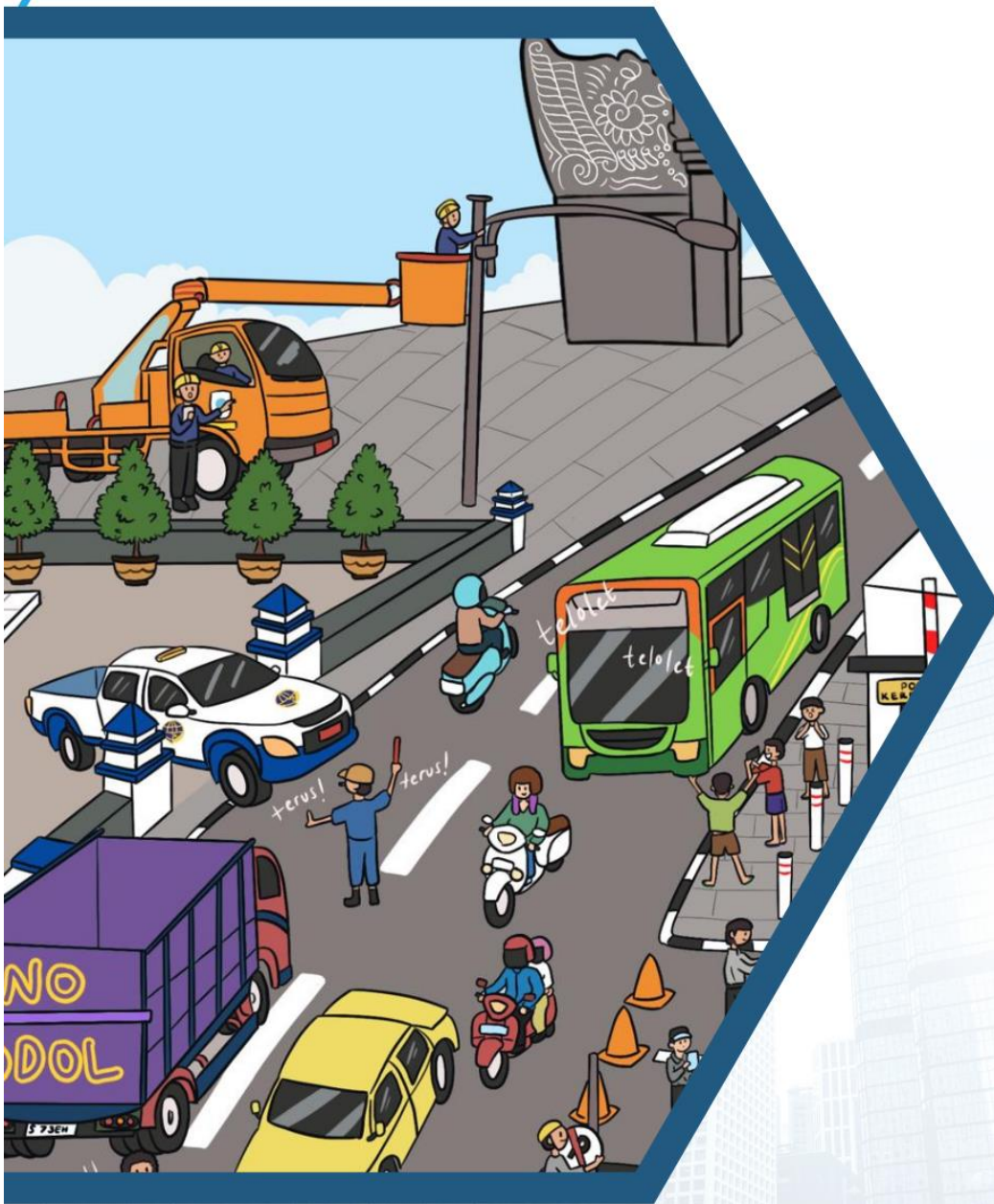


PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO

DINAS PERHUBUNGAN 2026



 dishub_lamongan

 lamongankab.go.id/dishub

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Dari risiko tersebut kemudian dilakukan analisis. Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level dan status risikonya.

Manajemen risiko sendiri merupakan proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui Manajemen risiko dalam arti lain yaitu pendekatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan risiko.

Manajemen risiko dilakukan untuk memetakan risiko yang berpotensi terjadi dalam suatu tahapan kegiatan birokrasi. Risiko yang dinilai berpotensi terjadi tentu harus dilakukan mitigasi agar dalam proses birokrasi suatu OPD dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Apabila manajemen risiko tidak dilakukan maka akan menghambat setiap tahapan kegiatan yang dilakukan dalam instansi pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan wajib dan perlu untuk melakukan manajemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indikator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Manajemen Risiko dilakukan untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Sedangkan Tujuan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indikator kinerja
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Manajemen yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan antara lain berkaitan dengan dokumen, sumber daya manusia. Berikut merupakan rincian indicator dalam ruang lingkup yang dijelaskan:

1. Penentuan Kegiatan yang dilakukan pengelolaan risikonya
2. Identifikasi risiko
3. Analisis risiko
4. Pengendalian risiko
5. Pemantaua risiko, dan
6. Koordinasi serta Komunikasi

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Kondisi lingkungan pengendalian saat ini dilakukan berdasarkan survei persepsi yang dilakukan. Sehingga nantinya dapat mengetahui kondisi eksisting OPD terkait pemahaman terhadap manajemen risiko.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil evaluasi persepsi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan maka akan diketahui perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan risiko yang ada di instansi pemerintah utamanya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

BAB III

PENILAIAN RISIKO DA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dalam manajemen risiko yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan tujuan strategis Penilaian risiko strategis yang bersumber dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Periode 2025-2029 antara lain meningkatnya kualitas layanan Perhubungan dengan sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Layanan Transportasi Darat,
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah,
3. Meningkatnya Konektivitas Daerah

Dinas Perhubungan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target nilai indeks 87,15 pada tahun 2026.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko dilakukan antara lain identifikasi risiko strategis dan risiko operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk empat Program dan 18 kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko di setiap tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Identifikasi risiko dilakukan oleh pemiliki risiko dengan melakukan rincian atribut-atribut risiko seperti uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Berikut merupakan empat program dan 18 kegiatan yang dilakukan identifikasi risiko oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2026:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

C. Hasil Analisis Risiko

Hasil analisis risiko Dinas Perhubungan berisi tentang skala risiko, matriks risiko dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Dari risiko yang telah diberikan skala jika memenuhi kategori sedang maka akan diberikan Rencana Tindak pengendalian (RTP) yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Berikut merupakan. Berikut merupakan matriks penilaian risiko sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan 1	Kecil 2	Besar 3	Sangat signifikan 4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Gambar III. 1 Matriks Hasil Analisis Risiko

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Berdasarkan hasil identifikasi risiko dalam setiap kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tentunya pemilik risiko melakukan pengendalian setiap risiko apabila risiko itu memang terjadi. Dengan melakukan pengendalian yang sudah ada maka pemilik risiko dapat menanggulangi atau memitigasi risiko yang apabila terjadi.

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Hasil identifikasi risiko setiap tahapan kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melakukan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) apabila risiko itu memiliki klasifikasi risiko Tinggi dengan range nilai (6-9). Jika penilaian risiko memiliki nilai tersebut maka dilakukan rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko tersebut

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

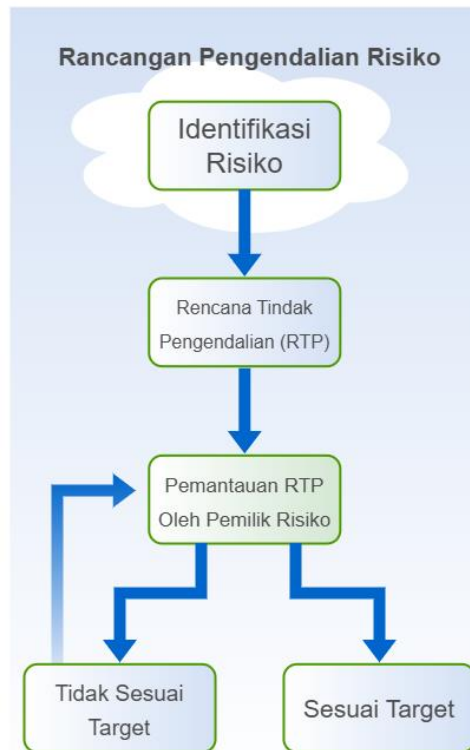
Rancangan Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten, rancangan media komunikasi antara lain melalui rapat staf internal untuk melakukan komunikasi mitigasi risiko yang dilakukan. Melalui rapat staf ini diharapkan risiko yang diidentifikasi bisa dipecahkan dan ditemukan solusi agar risiko tidak terjadi. Pengendalian risiko dilakukan pemantauan oleh pemiliki risiko agar proses mitigasi bisa dimonitor sesuai dengan keinginan dari pemiliki resiko. Penerimaan pengendalian risiko diharapkan untuk terus kooperatif agar pengendalian risiko yang dilakukan bisa sesuai dengan harapan.

Informasi dan komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dapat dipantau melalui tautan *Google Drive* yang telah disediakan sebagai media pemantauan pengendalian yang dilakukan.

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Rancangan Pemantauan



Gambar V. 1 rancangan Pengendalian Risiko Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Dinas Perhubungan melakukan pemantauan pengendalian yang dipimpin oleh pemilik risiko. Pemilik risiko memiliki kendali penuh atas kontrol pemantauan rencana tindak pengendalian (RTP) yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, pemilik risiko harus terus memantau target realisasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) agar bisa direalisasi sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil Manajemen Risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan tentu sudah di petakkan berdasarkan setiap tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian skala juga sudah dilakukan sebagai langkah untuk menentukan tindak pengendalian selanjutnya berdasarkan skala kemungkinan dan skala dampak yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasilnya adalah Dinas Perhubungan mampu untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang berpotensi menghambat tujuan organisasi pada tahun 2026. Hal ini tercermin dengan pengendalian risiko yang sudah ada saat ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga risiko yang telah diidentifikasi dapat diminimalisir terjadinya risiko tersebut.

Dinas Perhubungan terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindak mitigasi atau pengendalian terhadap risiko yang berpotensi terjadi di setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan demi mencapai tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah

LAMPIRAN

Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Dinas Perhubungan Tahun 2026

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab		Dampak		
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	Staff tidak memahami dokumen perencanaan yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
		Permintaan data ke bidang	Risiko Operasional : Lambatnya pemenuhan data dari bidang	Staff bidang lambat dalam pemenuhan data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
		Pengumpulan data dari bidang	Risiko Fraud : Memanipulasi data yang dikirimkan bidang	Petugas atau staff melakukan manipulasi data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
		Pengumpulan data dari bidang	Risiko Operasional: Format Data Tidak Sesuai Dengan Data yang diminta	Petugas atau staff melakukan manipulasi data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
		Verifikasi data	Risiko Operasional : kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Internal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Penginputan data	Risiko Operasional : kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan RKA	Risiko Operasional : lambatnya bidang dalam menyusun anggarannya	Petugas di bidang lambat dalam mengirimkan data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (man)	Internal	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
		Penetapan DPA	Risiko Pemangku Kebijakan : lambatnya proses pendandatangan penetapan DPA	Mitra lama dalam memproses verifikasi DPA	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Proses cek and re-check yang masih berlangsung (methode)	Internal	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
		Verifikasi berkas dari bidang	Risiko Operasional :Berkas dari Bidang Tidak Lengkap	Staff di bidang tidak lengkap dalam menyetorkan berkas	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Internal	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
		Pencairan Anggaran yang ada di DPA	Risiko Operasional : Terdapat Kesalahan Input Nominal Pencairan	Staff melakukan kesalahan dalam proses input	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Eksternal	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
		Penginputan data ke sistem	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	Staff melakukan kesalahan dalam proses input	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)		Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuantitas dan kualitas layanan administrasi kepegawaian	Verifikasi jabatan yang dibutuhkan	Risiko Operasional : Kurangnya pelatihan pada ASN	ASN kurang mendapatkan pelatihan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya anggaran yang tersedia (Methode)	Internal	Rendahnya kompetensi kualitas SDM	Dinas Perhubungan
		Pengadaan dan penempatan pegawai	Risiko Pemangku Kebijakan : Tidak tersedianya formasi yang dibutuhkan	Mitra tidak membuka formasi yang dibutuhkan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya pengadaan ASN yg dilaksanakan secara berkala (Man)	Internal	Memperlambat hasil kinerja	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Penetapan DPA diklat	Risiko Operasional : Minimnya anggaran diklat yang tersedia	Instansi memiliki anggaran terbatas	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya Anggaran Diklat untuk pendidikan dan pelatihan (Money)	Internal	Diklat tidak bisa dilakukan secara berkala	Dinas Perhubungan
		Evaluasi dan kualitas pelayanan	Risiko Kebijakan : Tidak adanya SOP	Instansi belum membuat SOP	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku (Material)	Eksternal	Lemahnya layanan kepegawaian	Dinas Perhubungan
		Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Risiko Operasional : Penginputan dilakukan secara manual	Staff melakukan input data secara manual	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT yang tersedia (Machine)		Tidak tertibnya administrasi kepegawaian	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penginputan Data	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Risiko Operasional : Rendahnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Petugas memiliki etos melayani rendah	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya koordinasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah (Material)	Internal	Kualitas pelayanan tidak sinkron	Dinas Perhubungan
		Ketidaksesuaian Kompetensi	Risiko Operasional : Pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan (SDM PPJB)	Petugas tidak memiliki keterampilan yang diperlukan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten karena tidak mengikuti diklat (Man)	Internal	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan
		Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat	Risiko Operasional : Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan	Instansi tidak melakukan realisasi anggaran sesuai perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya ketersediaan anggaran yang tersedia (Money)	Internal	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan
		Kelemahan sistem informasi	Risiko Operasional : Human error dalam penginputan data	Petugas lali dalam proses input data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT (Machine)	Internal	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
		Proses Manual yang Inefisien	Risiko Operasional : Ketergantungan pada proses manual	Petugas melakukan proses secara manual	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Proses yang berbelit-belit (Methode)		Pelayanan jadi terlambat	Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah	Penginputan Data	Pembuatan Rencana Kebutuhan	Risiko Fraud : Manipulasi kebutuhan yang diusulkan	Petugas melakukan manipulasi kebutuhan yang diusulkan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya transparansi dalam proses kegiatan (Material)	Internal	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Verifikasi Kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten (Man)	Internal	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan
		Perencanaan dalam pengadaan	Risiko Fraud : Kurang adanya transparansi dalam penggunaan anggaran	Bidang/Bagian kurang transparan dalam penggunaan anggaran	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terjadinya pembekakan biaya (cost overrun) (Money)	Internal	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan
		Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional: Gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan	Adanya gangguan teknis sarana penunjang	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan pendukung (Machine)	Eksternal	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi	Risiko Operasional : Pelakasanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan	Petugas melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya SOP dalam pelaksanaan (Method)		Terlambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Identifikasi kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya data kebutuhan yang akurat	Data kurang akurat	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengerjaan data dilakukan dengan manual (Material)	Internal	Terlambatnya proses pembuatan dokumen kegiatan	Dinas Perhubungan
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Risiko Operasional : Rendahnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang tersebut	Petugas kurang memiliki kompetensi terkait	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya adanya pelatihan (Man)	Internal	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
		Penatausahaan Keuangan	Risiko Operasional : Keterlambatan pembayaran tagihan	Petugas lalai dalam proses pembayaran	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya Komunikasi antar pihak (Money)	Eksternal	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan
		Ketergantungan Teknologi	Risiko Operasional : Ketergantungan berlebihan pada sistem tertentu	petugas memiliki ketergantungan pada sistem tertentu	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya yang mengakses secara bersamaan (Machine)	Internal	Jika sistem down, operasional terhenti	Dinas Perhubungan
		Ketidaksesuaian Prosedur Kegiatan	Risiko Fraud : Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan	Petugas mengabaikan SOP yang berlaku	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya ketentuan yang baku (Method)	Internal	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Tidak adanya kesesuaian spesifikasi	Risiko Operasional : Kualitas peralatan tidak sesuai dengan yang diinginkan	Peralatan kurang menunjang pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dengan pihak penyedia (Material)	Eksternal	Kualitas peralatan cepat rusak	Dinas Perhubungan
		Keterbatasan/Ketidaksesuaian SDM	Risiko Operasional : Kurangnya personel yang kompeten atau tidak sesuai keahliannya dengan kebutuhan jasa	Petugas kurang kompeten dalam suatu keahlian	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penempatan personel yang tidak sesuai dengan keahliannya (Man)	Internal	Ketidakefektifan pelaksanaan tugas	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional : Keterlambatan pencairan dana	Petugas lambat dalam melakukan proses pencairan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Prosedur administrasi keuangan yang panjang (Money)	Internal	Keterlambatan pembayaran ke penyedia jasa/mitra kerja	Dinas Perhubungan
		Deteksi peralatan secara berkala	Risiko Operasional : Kerusakan peralatan utama	Peralatan mengalami kerusakan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur (Machine)	Internal	Biaya perbaikan yang tinggi	Dinas Perhubungan
		Kurangnya Standar Kualitas	Risiko Operasional : Tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai hasil pekerjaan penyedia jasa	SOP tidak tersedia atau indikator penilaian tidak tersedia	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya SOP yang baku (Methode)	Internal	Kualitas layanan penunjang rendah, ketidakpuasan pengguna layanan	Dinas Perhubungan
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional : Minimnya SDM dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan	Staf mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan anggaran dalam memenuhi SDM (Money)	Internal	Memperlambat dalam penyusunan dan perencanaan	Dinas Perhubungan
		Pengumpulan data	Risiko Operasional : Data tidak akurat dan tidak relevan dengan kondisi riil	Staf belum memahami dalam pengumpulan data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kurangnya sumber daya (SDM, alat) untuk survei lapangan (Man)	Internal	Memperlambat dalam pengumpulan data	Dinas Perhubungan
		Penginputan data	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	Petugas kurang teliti dalam penginputan data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kelelahan atau kurang fokus petugas dalam penginputan data (Man)	Internal	Hasil data menjadi tidak akurat	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Pelaksanaan sosialisasi	Risiko Operasional: Sosialisasi tidak efektif atau minim partisipasi	Peserta tidak memahami materi yang disampaikan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Minimnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan yang ada (Methode)	Eksternal	Implementasi rencana tidak sesuai harapan	Dinas Perhubungan
		Evaluasi	Risiko Operasional: Tidak tercapainya tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran organisasi tidak tercapai sesuai target	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kekurangan personel terlatih, anggaran, atau teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi (Methode)	Internal	Hasil evaluasi menjadi tidak akurat	Dinas Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Terpasangnya Perlengkapan Sesuai Target	Penentuan titik pemasangan.	Risiko Operasional: Kesalahan dalam penentuan titik koordinat.	Petugas melakukan kesalahan teknis	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Kurang presisinya dalam penentuan titik koordinat (Methode)	Eksternal	Menyebabkan gangguan jarak pandang	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Rencana Anggaran (RAB):	Risiko Fraud: Adanya data inventaris yang tidak valid	Petugas melakukan input data yang tidak valid	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Perubahan harga bahan baku (baja/cat) (Money)	Eksternal	Terlambatnya proses penyusunan laporan	Dinas Perhubungan
		Proses Pengadaan Barang	Risiko Operasional: Potensi penyerahan barang menggunakan barang rekondisi	Petugas melakukan kelalaian	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Tidak adanya Standar Barang yang baku atau kurang akurat sebagai dasar perencanaan (Material)	Eksternal	Terlambatnya proses pengadaan	Dinas Perhubungan
		Mobilisasi & Pemasangan	Risiko Operasional: Adanya kecelakaan fisik pekerja	Petugas mengalami kecelakaan kerja	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Kecelakaan kerja akibat petugas tidak memahami prosedur K3 di jalan (Man)	Eksternal	Terlambatnya proses pelaksanaan pemasangan	Dinas Perhubungan
		Serah Terima Pekerjaan	Risiko Operasional: Kesalahan dalam uji fungsi hasil pasang	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi awal	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Sistem pengujian masih bersifat manual (Machine)	Eksternal	Menyebabkan gangguan yang kurang sesuai dengan spektek	Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	"Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)"	Pemeriksaan Kondisi Infrastruktur Terminal	Risiko Operasional: Kerusakan infrastruktur terminal	Oknum tidak bertanggung jawab merusak fasilitas terminal	ROO.26.03.15.27	UPT. Pengelolaan Prasarana	Kurangnya anggaran yang memenuhi untuk rehabilitasi infrastruktur (Money)	Internal	Memperlambat perbaikan infrastruktur	Dinas Perhubungan
		Survey Keselamatan Lalu Lintas di Area Terminal	Risiko Operasional: Kecelakaan lalu	Petugas atau warga sekitar terminal	ROO.26.03.15.27	UPT. Pengelolaan Prasarana	Kurangnya fasilitas keselamatan seperti rambu-	Internal	Tidak terimplementasinya tata	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			lintas di area Terminal	mengalami kecelakaan			rambu, marka jalan, dan penerangan yang memadai (Material)		kelola keselamatan yang komprehensif.	
		Observasi Kenyamanan dan Kelayakan Fasilitas Terminal	Risiko Operasional : Ketidaknyamanan dalam area terminal	pengguna jasa tidak nyaman di area terminal	ROO.26.03.15.27	UPT. Pengelolaan Prasarana	Petugas kurang ramah atau tidak kompeten dalam melayani penumpang, menyebabkan ketidakpuasan (Man)	Internal	Ketidakpuasan pengunjung terminal	Dinas Perhubungan
		Pemeriksaan Keamanan Lingkungan Terminal	Risiko Operasional : Tindak kriminal seperti pencurian area terminal	Oknum tidak bertanggungjawab melakukan kriminalitas	ROO.26.03.15.27	UPT. Pengelolaan Prasarana	Tidak Tersedianya fasilitas CCTV dalam area terminal (Machine)	Internal	Rawan tindak kriminal seperti pencurian yang tidak terpantau CCTV	Dinas Perhubungan
		Pemeriksaan Dokumen SOP Terminal	Risiko Operasional : Tidak ada standar operasional prosedur	Instansi tidak memiliki SOP	ROO.26.03.15.27	UPT. Pengelolaan Prasarana	Tidak ada evaluasi terhadap efektivitas prosedur yang sudah ada. (Metode)	Internal	Proses pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.	Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	Petugas kurang memahami tupoksi	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	Terjadinya kesalahan pemenuhan data karena data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta	Dinas Perhubungan
		Melakukan Sosialisasi	Risiko Pemangku Kebijakan : Lambatnya pemenuhan data dan informasi yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan	Mitra kerja lambat dalam proses pemenuhan data	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	Terulangnya permintaan perbaikan data sehingga memperlambat proses kerja dan penyelesaian laporan	Dinas Perhubungan
		Verifikasi permohonan	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai oleh pihak terkait	Petugas melakukan manipulasi data dengan sengaja	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya Pengawasan dan proses verifikasi yang belum optimal (Man)	Eksternal	Data dan dokumen yang dihasilkan tidak tervalidasi	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			dalam proses verifikasi permohonan.						dengan baik sehingga berisiko menimbulkan kesalahan administratif.	
		Penilaian teknis	Risiko Operasional: Format dan substansi data teknis yang disampaikan tidak sesuai sehingga menghambat proses penilaian.	Tidak adanya indikator penilaian	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)	Eksternal	Ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubungan
		Peninjauan lapangan	Risiko Operasional :Kurang telitinya petugas dalam melakukan peninjauan lapangan .	Petugas kurang teliti dalam peninjauan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	Ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubungan
		Penerbitan izin	Risiko Operasional : Kurang telitinya petugas dalam melakukan pemeriksaan akhir dokumen izin sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan izin.	Petugas kurang teliti dalam peninjauan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	Meningkatnya potensi kesalahan berulang karena proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat	Dinas Perhubungan
		Pelaporan dan monitoring	Risiko Operasional : Keterlambatan penyusunan laporan dan kegiatan monitoring akibat lambatnya penyampaian data pendukung.	Petugas kurang cepat dalam pembuatan dan penyusunan laporan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (Man)	Eksternal	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan akibat koordinasi internal yang melebihi batas waktu	Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang	Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di Loket Pendaftaran	Risiko informasi tata cara dan persyaratan tidak tersedia	Pemilik kendaraan bermotor melakukan permohonan	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Internal	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor yang

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Teruji Secara Berkala			Pengujian Kendaraan Bermotor						menguji kendaraan kendaraannya
		Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan didaftarkan uji	Risiko persyaratan pendaftaran tidak lengkap	Operator melakukan verifikasi permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Internal	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor yang menguji kendaraannya
		Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam hasil pemeriksaan administrasi dengan fisik kendaraan	Risiko kendaraan tidak laik jalan	Penguji Kendaraan Bermotor melakukan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan perlu perbaikan	Internal	Keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Pemilik kendaraan bermotor yang menguji kendaraannya
		Memasukan ke database aplikasi SIMPKB, Membuat kartu induk uji berkala, Memberikan nomor uji kendaraan, Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala	Risiko ketersediaan jaringan internet terputus	Penguji menentukan hasil uji dan operator melakukan cetak bukti lulus uji	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Faktor cuaca	Eksternal	Cetak bukti lulus uji tidak dapat diproses	Pengguna kendaraan bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan survay	Risiko Operasional : kurangnya sdm dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	Staf terlambat dalam menyelesaikannya	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perlunya pelatihan terhadap SDM bidang perencanaan kegiatan (Methode)	Internal	Ketidaktepatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan	Dinas Perhubungan
		Pengumpulan data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kesalahan dalam pengumpulan data	Petugas kurang memahamai dalam pengumpulan data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya data yang perlu dikumpulkan (Methode)	Eksternal	Tertundanya pengumpulan data	Dinas Perhubungan
		Input data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Gangguan sistem atau perangkat lunak	Petugas kesulitan dalam input data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perangkat lunak yang belum terupdate (Material)	Eksternal	Pekerjaan tertunda atau kehilangan data	Dinas Perhubungan
		Analisa data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kurangnya jumlah SDM dalam menganalisis	Petugas kurang memadai dalam analisa data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan SDM (Money)	Internal	Kesalahan dalam menganalisis data	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Penyajian data	Risiko Operasional : Keterlambatan dalam proses penyajian data	Petugas mengalami bebab kerja ganda	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Antrian pekerjaan atau kendala teknis menyebabkan analisis terlambat (Man)	Eksternal	Tertundanya dalam penyajian data	Dinas Perhubungan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Lalu Lintas	Risiko Fraud : Manipulasi data survei untuk mempercepat proses	Petugas melakukan manipulasi data dengan sengaja	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pengawasan lapangan dalam pelaksanaan survei (Method)	Internal	Hasil survei kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya.	Dinas Perhubungan
		Analisis Dampak Lalu Lintas	Risiko Operasional :Kesalahan perhitungan LOS/proyeksi lalu lintas	Petugas melakukan kesalahan dalam proses penghitungan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan perhitungan teknis serta keterbatasan kompetensi analisis lalu lintas (Man)	Internal	Kesalahan dalam hasil analisis teknis lalu lintas yang berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat.	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Dokumen Andalalin	Risiko Operasional :Human error dalam penyusunan data	Petugas melakukan kelalaiian dalam pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses penyusunan dan penginputan data (Man)	Eksternal	Ketidaksesuaian antara data input dengan kondisi riil yang berdampak pada rendahnya keandalan data	Dinas Perhubungan
		Pengajuan data	Risiko Operasional: kesalahan dalam pengajuan data	Petugas melakukan kelalaiian dalam pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)		Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan sehingga menghambat proses evaluasi dan audit	Dinas Perhubungan
		Melaksanakan tindakan mitigasi	Risiko Fraud : Penggunaan anggaran mitigasi tidak sesuai ketentuan	Petugas dengan sengaja menyelewengkan anggaran kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta keterbatasan	Internal	Terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
							pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku (Money)		akibat lemahnya pengawasan.	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tahap Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen audit dan inpeksi keselamatan	Petugas kurang memahami tupoksi	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Terbatasnya sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait audit dan inspeksi keselamatan (Man)	Internal	Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi petugas	Dinas Perhubungan
		Tahap Pengumpulan Data	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami data yang akan dikaji	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)	Internal	Menghambat proses verifikasi dan pelaporan.	Dinas Perhubungan
		Tahap kegiatan lapangan / PAM	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai dengan yang ada	Petugas melakukan manipulasi data dengan sengaja	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan dan validasi data (Material)	Eksternal	Tidak adanya standar yang seragam dalam pengelolaan dan validasi data sehingga proses kerja tidak konsisten	Dinas Perhubungan
		Tahap Identifikasi Masalah Keselamatan	Risiko Operasional :Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)		Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan
		Tahap Analisis Risiko Keselamatan	Risiko Operasional :Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Internal	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan
		Tahap Penyusunan Rekomendasi	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen rekomendasi yang akan disusun	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Internal	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Penyusunan dan perencanaan kegiatan Bimbingan teknis bagi pengemudi	Risiko Operasional : Keterbatasan SDM dalam Perencanaan	Petugas kurang memadai dalam penyusunan dan perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Tim penyusun kegiatan memiliki beban kerja tinggi (Man)	Internal	Memperlambat penyusunan dan perencanaan kegiatan	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		Pengumpulan data pengemudi angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kapasitas SDM Pengolah Data Terbatas	Petugas terlambat dalam penyelesaian pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya data yang perlu dikumpulkan (Man)	Eksternal	Potensi kesalahan input dan keterlambatan.	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan bimbingan teknis pengemudi angkutan oran dan angkutan barang	Risiko Operasional : Peserta pasif atau tidak mendengarkan	Peserta kurang memahami materi yang disampaikan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Peserta Tidak Fokus atau Kurang Berpartisipasi (Man)	Eksternal	Bimbingan tidak efektif dan pengemudi kurang memahami materi	Dinas Perhubungan
		Evaluasi dampak dari hasil kegiatan bimbingan teknis angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kesalahan input data atau perhitungan yang menyebabkan hasil evaluasi salah	Petugas melakukan pengisian data yang tidak sesuai atau salah perhitungan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Tim evaluasi tidak cukup jumlah atau jadwal terlalu mepet sehingga analisis kurang mendalam (Man)	Eksternal	Hasil evaluasi tidak maksimal	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan pembinaan dilapangan terkait peraturan kelalu lintasan bagi pengemudi angkutan orang dan angkutan barang	Risiko Operasional : Pengemudi angkutan yang masih tidak tertib	Peserta mengabaikan hasil pembinaan dan sosialisasi	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Materi yang disampaikan kurang dapat diterima oleh pengemudi karena sudah terbiasa tidak tertib (Methode)	Eksternal	Pembinaan tidak efektif dan pengemudi kurang memahami aturan	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional: Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Petugas tidak akurat dalam melakukan penyusunan dan perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan sumber daya ahli perencanaan (Man)	Internal	Penundaan operasional, menimbulkan kerugian waktu dan finansial	Dinas Perhubungan
		Pengumpulan data	Risiko Operasional: Ketidakkuratan data yang dikumpulkan	Petugas memasukan data yang tidak valid	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kesalahan manusia (human error) saat entri data (Man)	Internal	Memperlambat dalam pengumpulan data	Dinas Perhubungan
		Monitoring secara berkala sarana dan prasana	Risiko Operasional: Tidak optimal dalam	Petugas tidak bisa mengidentifikasi	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan monitoring (Man)	Internal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		keselamatan pada pelayanan ASDP	pelaksanaan monitoring	permasalahan secara dini					ASDP jadi terhambat	
		Evaluasi hasil monitoring	Risiko Operasional: Terhambatnya hasil evaluasi	Staf evaluasi belum didukung dengan sistem yang memadai	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kurang kompetennya tim evaluasi karena minim SDM (Man)	Internal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan ASDP jadi terhambat	Dinas Perhubungan
		Sosialisasi dan melakukan peningkatan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP	Risiko Operasional: Kurang maksimalnya peningkatan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP	Pelaku ASDP belum memiliki fasilitas keselamatan yang memadai	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Minimnya anggaran dalam pemenuhan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP (Money)	Internal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan ASDP tidak terpenuhi dengan baik	Dinas Perhubungan
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan	Risiko Operasional : kurangnya SDM dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	Petugas terbatas dalam memahami perencanaan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perlunya pelatihan terhadap SDM bidang perencanaan penganggaran dan pelaporan kegiatan (Methode)	Internal	Ketidaktepatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan	Dinas Perhubungan
		Monitoring secara berkala sarana dan prasana keselamatan pada perlintasan sebidang	Risiko Operasional : Kuantitas SDM yang ada di Bidang Angkutan tidak memadai dibandingkan jumlah obyek yang harus di monitoring	Petugas terbatas dalam melakukan pengawasan atau monitoring	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya aset palang pintu namun untuk staff teknis yang mampu dalam melakukan perbaikan sangat minim (Man)	Internal	Tertundanya perbaikan terhadap palang pintu yang berakibat tidak dapat berfungsi secara maksimal	Dinas Perhubungan
		Dari hasil monitoring kemudian dilaksanakan perbaikan terhadap kerusakan palang pintu maupun peralatan yang lainnya	Risiko Operasional : Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding dengan tenaga teknis yang ada sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perbaikan palang pintu	Tenaga teknis terlambat dalam menyelesaikan perbaikan palang pintu	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Suku cadang pada peralatan palang pintu banyak yang tidak tersedia di toko lamongan (Material)	Eksternal	Terganggunya fungsi dan operasional palang palang pintu perlintasan	Dinas Perhubungan
		Melaksanakan pembinaan petugas dan sekaligus melaksanakan pengecekan	Risiko Operasional : perlunya penambahan SDM yang Khusus	Petugas teknis dan staf merangkap tugas	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Petugas perlu mendapatkan pelatihan agar lebih profesional	Internal	Terganggunya pelayanan akibat Sdm yang tidak	Dinas Perhubungan

Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko				Sebab		Dampak	
			Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		dari hasil perbaikan yang telah dilakukan	menangani perbaikan, monitoring dan bagian administrasi khusus pencatatan absensi dan kegiatan perbaikan serta update data	dalam menangani pekerjaan			dalam bidang tugasnya masing masing (Man)		memadai dengan kebutuhan serta kecepatan penanganan peralatan yang rusak	
		Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap apa yang sudah dilaksanakan	Risiko Operasional : Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding dengan tenaga teknisi yang ada	Tenaga teknisi tidak optimal dalam menangani perbaikan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perlu penambahan terhadap tenaga teknis perbaikan peralatan untuk mempercepat penangana kerusakan (Man)	Internal	Tertundanya perbaikan terhadap palang pintu yang berakibat tidak dapat berfungsi secara maksimal	Dinas Perhubungan